

# TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA: TINJAUAN PRAKTIK KEBERAGAMAAN ISLAM “GARIS KERAS”\*

Oleh:  
Miftahuddin

Dosen Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY  
Email: [miftahuddin@uny.ac.id](mailto:miftahuddin@uny.ac.id) atau [miftah\\_uny@yahoo.com](mailto:miftah_uny@yahoo.com)

## ABSTRAK

Cita-cita yang ingin dicapai negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakatnya secara keseluruhan berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Dapat diyakini apabila Pancasila ini telah diamalkan dengan benar menandakan demokrasi yang ideal dan sebenarnya telah tercapai di Indonesia. Termasuk umat Islam sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terbesar juga harus mengamalkan Pancasila. Bahkan, Pancasila sendiri adalah produk dari sebagian para tokoh umat Islam yang ingin menjadikan bangsa ini berdiri. Hanya saja dalam perjalanannya ada sebagian umat Islam yang mempermasalahkan Pancasila. Padahal diketahui bahwa Islam dan Pancasila adalah berjalan seiring dan sejalan. Untuk itu, artikel ini mencoba untuk melihat praktik keberagamaan dan sosial kelompok Islam “garis keras” yang diasumsikan tidak sejalan dengan cita-cita Pancasila.

Dari kajian yang dilakukan beberapa sarjana bahwa memang ada kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia yang paraktik keberagamaan dan sosial mereka jauh menyimpang dari tujuan nilai-nilai pancasila. Gerakan-gerakan Islam “garis keras” seringkali menjalankan aksinya dengan melanggar aturan main demokrasi. Tidak hanya itu, tetapi dapat disaksikan bahwa konsepsi pemikiran dari kalangan mereka juga menentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri sebagai sebuah aturan main yang telah disepakati bersama. Sikap kelompok Islam “garis keras” biasanya anti terhadap semua sistem Barat, khususnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, anehnya mereka menikmati berbagai hasil teknologi Barat. Di mata mereka, demokrasi dan hak-hak asasi manusia adalah produk Barat sehingga harus dilawan karena merusak Islam. Mereka ingin menciptakan sebuah dunia cita-cita berdasarkan tafsiran mereka yang monolitik terhadap Al-Qur’an dan sejarah Nabi. Jika hal ini yang dipegangi, dengan sendirinya Pancasila bukanlah cita-cita mereka. Oleh karena itu, sikap mereka harus disadarkan atau diperangi.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Indonesia, Islam Garis Keras, dan Pancasila

### A. Pendahuluan

---

\* Disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Prodi Ilmu Sejarah dan HIMA Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY dengan tema “**DEMOKRASI DI INDONESIA DULU, SEKARANG, DAN AKAN DATANG**”, Kamis, 15 Oktober 2015.

Banyak pengertian yang bisa diungkapkan ketika melihat Islam sebagai suatu agama. Misalnya, Islam adalah agama *rahmatan li al-'alamin*, Islam adalah agama pembawa keselamatan, Islam adalah agama yang pemeluknya memasrahkan diri hanya kepada Allah, Islam adalah agama yang cinta perdamaian, Islam adalah agama yang tidak memaksa manusia untuk memeluknya, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini jelas, bahwa ajaran Islam adalah sangat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Jika demokrasi adalah perjuangan agar bagaimana masyarakat hidup tentram, terjadi dialog dan musyawarah untuk memperoleh kebaikan bersama, dijaminnya kebebasan untuk berpendapat, terciptanya keadilan, dan sebagainya, maka jelas-jelas Islam sejak awal memperjuangkan hal-hal tersebut.

Yang penting untuk ditegaskan bahwa sejak awal berdirinya negara Indonesia, umat Islam sepakat untuk menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menegakkan Indonesia. Masyarakat Islam awal di Indonesia sangat memahami bahwa demokrasi adalah sebagai bentuk kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan kegiatan, memeluk keyakinan, bebas beribadah, dan berbagai kebebasan lainnya, yang kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai Islam, artinya setiap warga negara bebas melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'at Islam. Jadi, demokrasi yang dipahami adalah demokrasi yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan pijakannya pada nilai-nilai kemanusiaan religius, dan inilah yang memang dipesankan Islam dalam relasi sosialnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana dikatakan bahwa, kaum Muslimin Indonesia umumnya menerima demokrasi. Mereka memandang bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam; pada dasarnya tidak ada masalah di antara Islam dan demokrasi. Dengan penerimaan dan penerapan demokrasi, Indonesia bukan hanya merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 485.

dunia, sekaligus juga negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Umat Islam Indonesia tidak menemui kesulitan apa pun dalam menyesuaikan ajaran Islam dalam prinsip-prinsip demokrasi. Sudah sejak awal mayoritas umat Islam Indonesia adalah pendukung demokrasi. Berbeda dengan mitranya di berbagai belahan dunia yang menolak atau ragu terhadap demokrasi, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim malah memandang demokrasi sebagai realisasi prinsip *syura* seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Selain karena pertimbangan agama, umat Islam Indonesia mendukung demokrasi juga berdasarkan realitas perimbangan jumlah mereka yang mayoritas sebagai pemeluk Islam. Melalui demokrasi, cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan Islam akan lebih mudah diperjuangkan. Oleh sebab itu, munculnya partai-partai yang bercorak Islam sebelum dan pasca-Proklamasi adalah dalam rangka menegakkan pilar-pilar demokrasi itu, sekalipun sering terhempas dalam perjalanan.<sup>3</sup>

## **B. Hubungan Islam dengan Demokrasi**

Banyak orang yang salah paham seakan Islam sama sekali menolak ide demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai produk impor dari peradaban Barat yang didasarkan atas paham liberalisme dan individualisme yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Islam menolak individualisme dan liberalisme yang mengagungkan pemungutan suara mayoritas. Islam lebih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Karena itu, diyakini oleh banyak kalangan bahwa Islam hanya mengidealkan prinsip nomokrasi, bukan demokrasi seperti yang secara umum diterima di zaman sekarang. Demokrasi yang diidentikkan dengan paham liberalisme hanya

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Islam dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia, Turki, dan Negara-Negara Arab*, Makalah ini disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Yayasan Paramadina. Jakarta, 17 Juli 2013, <http://paramadina.or.id/2013/11/06/islam-dan-demokrasi/>, diakses 15 September 2015.

<sup>3</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 148.

mengutamakan kebebasan individu di atas kepentingan bersama, yang oleh karena itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>4</sup>

Pandangan demikian, tampaknya disebabkan oleh kesalahpahaman. Demokrasi diartikan secara sangat sempit seakan hanya terkait dengan sistem pengambilan keputusan berdasarkan prinsip *'one-man-one-vote'*. Atas pengertian demikian itu, demokrasi dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang permusyawaratan dan permufakatan. Seharusnya, konsep musyawarah dalam tradisi Islam, haruslah dipahami secara lebih mendalam, tidak sekedar bersifat teknis prosedural. Prinsip permusyawaratan itu sebenarnya lebih mengutamakan kualitas substansi keputusan, bukan prosedur kuantitatif berdasarkan suara mayoritas.<sup>5</sup>

Sebenarnya umat Islam-lah yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam pengertian modern. Di zaman Yunani kuno, ide demokrasi itu sendiri belumlah dianggap sebagai gagasan yang baik. Istilah demokrasi itu sendiri baru mendapatkan penilaian yang positif, setelah sekian lama dalam sejarah berkembang praktik-praktik yang dianggap ideal, sehingga di kemudian hari diberi sebutan demokrasi yang diambil kembali dari istilah yang pernah dipakai di zaman Yunani kuno.<sup>6</sup>

Karena pada hakikatnya agama dan demokrasi mempunyai komitmen dan tujuan yang sama, maka dirasa penting apabila adanya penggabungan antara agama dan demokrasi. Penggabungan ini sebenarnya dilatarbelakangi karena melihat kenyataan historis bahwa dalam kultur politik masyarakat sekuler liberal, pemerintah dan rakyatnya bertindak seakan-akan tidak ada Tuhan, berjalan dengan sama sekali mengabaikan eksistensi dan non-eksistensi-Nya, tidak pernah mempertimbangan restu dan larangan-Nya dalam kebijakan dan perilaku mereka. Sebaliknya, bentuk pemerintahan agama masa lampau (pada masa paus Katolik dan Khalifah Muslim) dianggap hanya mengurus amanat Tuhan, bukan manusia. Mereka melihat kepuasan rakyat sebagai akibat sampingan alami

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Islam Tentang Teokrasi, Demokrasi, dan Nomokrasi", 70  
TAHUN PROF. DR. TAHIR AZHARY, SH.,  
<http://www.jimly.com/makalah/namafile/152/>, diakses 15 September 2015.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

dan tergantung dari kepuasan Tuhan. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya pemerintahan Islam konteks sekarang ini dibentuk? Mungkinkah kebebasan pemerintah demokrasi modern dapat dinikmati tanpa harus mengabaikan eksistensi Tuhan? (Abdolkarim Soroush, 2000: 122).<sup>7</sup>

Untuk itu, perlu dibedakan antara demokrasi dan liberalisme Barat. Di dunia Barat dapat dilihat ketidakadilan, kolonialisme, dan arogansi terhadap negara lain bergandengan dengan mengejar kebebasan (liberalis). Bagi Barat, berpisah dengan metafisika berarti berpisah dengan semua kebutuhannya, seperti gereja dan pendeta, hukum Tuhan, etika, kecaman agama, pemerintahan agama, dan kepasrahan yang baik. Pendeknya, setiap institusi agama yang mengawasi urusan duniawi dalam bentuk apa pun, ditinggalkan, sehingga kebebasan liberal adalah kebebasan dari belenggu agama dan metafisika. Dengan demikian, bagi Soroush, mempersamakan liberalisme dan demokrasi sama dengan menunjukkan kebutaan terhadap liberalisme dan kezaliman besar terhadap demokrasi (Abdolkarim Soroush, 2000: 137-138).

Dengan demikian, kombinasi agama dan demokrasi adalah contoh kesesuaian antara agama dan akal. Faktanya jelas bahwa upaya tersebut sekaligus adalah mengandung nilai agama, berguna, dan pertanda baik. Pemikiran semacam itu tidak berarti dinodai oleh kecenderungan anti-agama atau berpihak secara curang untuk menggantikan religiusitas dengan keduniawian. Kombinasi agama dan demokrasi adalah kecerdasan metareligious yang memiliki setidaknya beberapa dimensi epistemologis extrareligious. Oleh karena itu, kepercayaan secara eksklusif pada hukum-hukum agama dan kedangkalan pandangan ijtihad hukum (*ijtihad fiqhi*) agar menolak demokrasi dalam konteks keagamaan dianggap sakit dan tidak sehat. Bukankah diakui bahwa demokrasi adalah sebagai metode yang berhasil untuk membatasi kekuasaan, mencapai keadilan, dan mencapai hak asasi manusia, sehingga pemahaman agamalah yang harus menyesuaikan diri dengan demokrasi dan bukan sebaliknya, karena

---

<sup>7</sup> Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy In Islam*, (Oxford University Press, 2000).

keadilan, sebagai nilai, tidak dapat menjadi agama. Agamalah yang harus adil, dan metode membatasi kekuasaan tidak berasal dari agama, meskipun agama mengambil manfaat dari metode itu (Abdulkarim Soroush, 2007: 312).

Memang tidak sepenuhnya salah jika terdapat tuduhan bahwa agama cenderung menghalangi proses demokratisasi karena agama selalu melahirkan kelompok elite yang merasa memiliki otoritas atas nama Tuhan. Secara historis-sosiologis cukup bukti yang membenarkan tuduhan ini. Meskipun Islam diyakini sebagai agama yang sarat dengan doktrin keadilan, persamaan, dan musyawarah, namun secara empiris tidaklah mudah untuk menemukan model yang mendekati, negara dan masyarakat Islam manakah yang mencerminkan nilai-nilai luhur itu. Namun begitu, karena muatan agama selalu bersifat normatif maka akan jelas bahwa pada dasarnya agama sangat *concerned* dan *comitted* dengan upaya demokratisasi. Tetapi barangkali perhatian yang lebih mendasar dari agama bukanlah demokrasi dalam bentuk formalnya melainkan tujuan yang hendak diraih dengan proses demokratisasi itu sendiri, terutama terwujudnya keadilan dan hak-hak asasi manusia (Komaruddin Hidayat, 1998: 17).

### **C. Kelompok Islam “Garis Keras” dan Persoalan Demokrasi**

Salah satu persoalan yang dihadapi konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah adanya gerakan-gerakan Islam “garis keras” yang seringkali menjalankan aksinya dengan melanggar aturan main demokrasi. Tidak hanya itu, tetapi dapat disaksikan bahwa konsepsi pemikiran dari kalangan mereka juga menentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri sebagai sebuah aturan main yang telah disepakati bersama. Meskipun demikian, gerakan Islam radikal atau fundamentalis sama sekali bukan representasi dari umat Islam Indonesia pada umumnya. Mayoritas umat Islam Indonesia, setidaknya adalah sebagaimana tercermin dalam garis politik berbagai organisasi masa terkemuka seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya diketahui berhaluan moderat. Dengan

demikian, kekhawatiran yang terlalu berlebihan terhadap gerakan-gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di negeri ini, sebenarnya tidak cukup beralasan<sup>8</sup> walaupun tetap harus diwaspadai.

Beberapa kajian telah membuktikan, bahwa sikap kelompok puritan biasanya anti terhadap semua sistem Barat, khususnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, anehnya mereka menikmati berbagai hasil teknologi Barat. Di mata mereka, demokrasi dan hak-hak asasi manusia adalah produk Barat sehingga harus dilawan karena merusak Islam. Mereka ingin menciptakan sebuah dunia cita-cita berdasarkan tafsiran mereka yang monolitik terhadap Al-Qur'an dan sejarah Nabi. Kelompok ini juga tersebar hampir di seluruh Dunia Islam yang pada umumnya berideologi tunggal: ingin mengubah dunia secara berani dan cepat, sekaligus dibayar dengan darah. Sebenarnya, kelompok ini tidak punya gagasan peradaban yang jelas, tetapi relatif terikat oleh ideologi tunggal yang fasistis. Sebaliknya, kelompok moderat pada umumnya menerima dan membela demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Mereka tidak risau apakah gagasan itu berasal dari Barat atau Timur. Selama prinsip-prinsip itu mendukung cita-cita Al-Qur'an bagi tegaknya keadilan, perdamaian, moralitas, dan hubungan baik sesama umat manusia, mengapa harus ditolak.<sup>9</sup>

Jika dilakukan pelacakan, maka kelompok-kelompok garis keras yang ada di Indonesia mempunyai relasi dan kontak-kontak langsung dengan tokoh-tokoh garis keras transnasional. Relasi mereka juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi, dan tujuan gerakan. Kelompok-kelompok ini diyakini berbahaya dan mengancam Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, di samping juga merupakan ancaman serius terhadap Islam Indonesia yang santun dan toleran. Di antara gerakan-gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia adalah, *pertama*, Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir. Ikhwanul Muslimin hadir di Indonesia pada awalnya melalui lembaga-lembaga

---

<sup>8</sup> M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 358.

<sup>9</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *op. cit.*, hlm. 154-155.

dakwah kampus yang kemudian menjadi Gerakan Tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Kedua*, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan Pan-Islamismenya yang ingin menegakkan Khalifah Islamiyah di seluruh dunia, dan menempatkan Nusantara sebagai salah satu bagian di dalamnya. *Ketiga*, Wahabi yang berusaha melakukan wahabisasi global. Di antara gerakan transnasional tersebut, Wahabi adalah yang paling kuat, terutama dalam hal pendanaan karena punya banyak sumur minyak yang melimpah.<sup>10</sup>

Sementara itu, kehadiran Wahabi di Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dengan dukungan dana besar dari *Jama'ah Salafi* (Wahabi), DDII mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke Timur Tengah, sebagian dari mereka inilah yang kemudian menjadi agen-agen penyebaran ideologi Wahabi-Ikhwani Muslimin di Indonesia. Balakangan, dengan dukungan penuh dana Wahabi-Saudi, DDII mendirikan LIPIA dan kebanyakan alumninya kemudian menjadi agen Gerakan Tarbiyah dan *Jama'ah Salafi* di Indonesia.<sup>11</sup>

Selain DDII, yang menjelang dan setelah Orde Baru tumbang, Indonesia juga menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok keras lokal yang tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Beberapa di antara kelompok ini antara lain Fron Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, Komite Persiapan Penerapan Syari'ah (KPPS) di beberapa daerah, dan lain-lain.<sup>12</sup> Dapatlah dikemukakan bahwa agenda utama kelompok-kelompok garis keras adalah untuk meraih kekuasaan politik melalui formalisasi agama. Mereka mengklaim, jika Islam menjadi dasar negara, jika syari'ah ditetapkan sebagai hukum positif, dan jika Khalifah Islamiyah ditegakkan, maka semua masalah akan selesai. Padahal semua ini adalah utopia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 77-78.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

Pemahaman dan keberagaman kelompok-kelompok garis keras sangat jauh berbeda jika dibandingkan pemahaman dan keberagaman umat Islam moderat. Pada satu sisi, sebagai akibat dari interpretasi sempit dan terbatas atas ajaran Islam, mereka lebih menekankan keberagaman lahiriyah dan abai terhadap yang batiniah. Simbol, identitas dan kuantitas bagi mereka lebih penting dibandingkan tingkat kesadaran spriritual dan kualitas dalam beragama. Mereka ingin memaksakan pemahamannya tentang Islam kepada siapa pun melalui formalisasi dan implementasi hukum Islam, mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, dan hal-hal terkait lainnya.<sup>14</sup>

Jika formalisasi agama menjadi tujuan ketika beragama, maka ini adalah kesalahan teologis yang harus diluruskan, bahkan harus dilawan jika disebarkan kepada orang lain. Setiap usaha formalisasi agama adalah murni bertujuan politik, untuk meraih kekuasaan. Jika dikatakan hal itu berdasarkan fakta bahwa Allah Swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia, ini jelas sebuah kesalahpahaman teologis yang harus ditolak. Bukan bentuk negara maupun formalisasi agama yang dibutuhkan untuk menjadi muslim yang baik, tetapi keikhlasan kesadaran spiritual untuk selalu merasakan kehadiran Ilahi. Oleh karena itu, klaim untuk mewujudkan masyarakat Islami melalui implementasi syari'ah maupun pendirian Negara Islam dan Khilafah Islamiyah adalah semata manuver politik untuk meraih kekuasaan.<sup>15</sup>

Fron Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKASWJ) beserta sayap milisinya Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) beserta Laskar Mujahidin-nya, Hizbut Tahrir, Hamas, Front Hizbullah, Ikhwanul Muslimin, dan Kisdidi (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), seluruhnya memiliki kepedulian yang sama, yakni bahwa syariat Islam seharusnya ditanggapi lebih serius oleh negara maupun masyarakat Muslim yang lebih luas. Sudut pandang ini didasari terutama atas tiga faktor penting, yaitu teologis, demografis,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

dan sosio-politik. Kelompok-kelompok ini secara ideologi sering disebut berada dalam bingkai Gerakan Salafi Militan.

Golongan-golongan Islam tersebut memandang bahwa secara teologis Islam mengandung fakta sebagai agama yang menawarkan pedoman dan solusi bagi seluruh aspek kehidupan, sosial-budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Posisi ini telah menyebabkan mereka percaya bahwa seluruh Muslim memiliki kewajiban keagamaan untuk mendasarkan seluruh aspek kehidupan mereka atas nilai-nilai dan ajaran Islam sebagaimana digariskan di dalam syariah. Faktor demografis mengacu kepada fakta bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, dengan jumlah mencapai 89% dari total jumlah penduduk. Bagi mereka, fakta ini saja seharusnya menjadi legitimasi sosial-budaya dan politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, atau setidaknya mengakui syariah Islam sebagai unsur inti atau bagian integral dari konstitusi. Faktor sosial-politik mengacu pada fakta bahwa hukum positif-sekuler tidak melahirkan kebaikan perbaikan sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik bagi kaum Muslim.<sup>16</sup>

Golongan Islam yang ada dalam bingkai Gerakan Salafi Militan memang tidak sempat berkembang pada masa rezim Orde Baru yang otoriter. Namun, di masa pemerintahan Habibie, gerakan-gerakan militan itu bebas mengembangkan eksistensi dan misinya. Dalam kenyataannya, di bawah pemerintahan Habibie kebebasan pers dan hak-hak sipil berkembang luas, sehingga memberikan sumbangan signifikan dalam memperkuat masyarakat sipil. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Habibie dan berbarengan dengan eforia gerakan reformasi, Islam politik tampak ingin mengambil momentum.<sup>17</sup>

Karakteristik Gerakan Salafi Militan, *pertama*, ia cenderung mempromosikan “peradaban tekstual Islam”. Peradaban tekstual merupakan paradigma menkonstruksi otoritas penafsir dalam posisi

---

<sup>16</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 436.

<sup>17</sup> M Syafi'i Anwar, “Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia”, *Pengantar dalam M Zaki Mubarak, Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. xiii.

dominan di dalam memberi pemahaman agama. Teks sepenuhnya dipahami hanya sebagai teks. Memahami teks semata-mata teks, dan bukan wacana yang perlu ditelusuri secara cermat dan integratif akan mendiskriminasi konteks historis, sosiologis, dan latar belakang kultural dari teks tersebut. Ketika menafsirkan dengan cara ini, maka akan melahirkan sikap kaku, literal, dan intoleran kepada sesama di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

*Kedua*, Gerakan Salafi Militan setia pada “*syari’ah minded*”. Jadi, seruan inti dari gerakan ini adalah formalisasi syari’ah di tingkat negara di seluruh aspek kehidupan Muslim. Dalam konteks Indonesia, seruan tersebut menemukan justifikasinya dalam era reformasi yang telah memberikan rakyat kebebasan berpendapat, setelah 32 tahun di bawah rezim otoriter Soeharto, ketika gerakan-gerakan Islam ditindas. *Ketiga*, kepercayaan yang berlebihan terhadap teori konspirasi, dan bahwa umat Islam adalah korbannya. Dalam konteks ini, kepercayaan yang berlebihan terhadap teori konspirasi dinisbatkan ke dalam kecurigaan dan tuduhan sengit bahwa Barat, terutama Amerika dan sekutu-sekutunya, memang mempunyai agenda tersembunyi untuk menghancurkan atau melenyapkan Islam dari muka bumi.<sup>19</sup>

*Keempat*, Gerakan Salafi Militan cenderung mengembangkan agenda anti pluralisme. Gerakan ini mempunyai kecenderungan kuat untuk merendahkan pluralisme, dengan menganggap ide tersebut menyerang Islam sebagai kebenaran tunggal, sedangkan orang lain dianggap tidak beriman dan telah menyimpang dari Islam atau kafir. Ia juga mengklaim Tuhan telah menciptakan perbedaan antara “Muslim” dan “Kafir”. Berdasarkan interpretasi literal dan tekstual terhadap al-Qur’an, gerakan militan ini juga meyakini Tuhan telah berfirman bahwa Yahudi dan Kristen sebagai “kelompok terkutuk” dan selalu memiliki agenda merayu dan mengajak Muslim menjadi pengikut mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. xvii.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. xviii.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. xix.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi kalangan Islam “garis keras”, kecenderungan sebagian umat Islam untuk menjadikan syari’at Islam seolah-olah bagaikan obat antibiotik yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan di segala zaman. Mereka memandang, bahwa syari’at Islam itu sempurna dan karenanya mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai ibadah, *muamalah* sampai sistem pemerintahan. Implikasinya adalah seolah-olah syari’at Islam tidak membutuhkan teori atau ilmu non-syariah. Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh syari’at Islam yang telah diturunkan Allah lima belas abad yang lampau.<sup>21</sup> Betulkah pandangan yang demikian itu?

#### **D. Penutup**

Penting ditegaskan bahwa Pancasila adalah landasan dan dasar yang sangat cocok agar Indonesia tetap berdiri dengan kokoh. Pancasila adalah dasar yang apik dan telah teruji kebenarannya untuk melandasi suatu negara yang masyarakatnya beragam suku dan keyakinan. Ingat bahwa ketika para pendiri bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara bukannya tanpa sebab, tetapi ini adalah pilihan yang paling tepat setelah mengadakan kajian dengan melihat secara teliti dan kontekstual kondisi Indonesia yang sebenarnya. Akhirnya, mereka bersepakat untuk bersatu dalam perbedaan dan Pancasila sebagai landasan dan paradigmanya.

Untuk itu, gerakan dan ideologi apa pun yang tumbuh di Indonesia jika tidak sesuai dengan tujuan Pancasila maka harus dilawan. Keberadaan Islam “garis keras”, misalnya, jika gerakan mereka membahayakan Pancasila maka harus diluruskan dan tidak menutup kemungkinan untuk diperangi. Semestinya mereka harus sadar bahwa mereka adalah hidup di Indonesia yang diketahui masyarakatnya plural. Ideologi Islam yang mereka pegangi semestinya perlu ditafsirkan ulang, bahwa sebenarnya Islam bukan suatu penghalang untuk dapat hidup harmonis bersanding

---

<sup>21</sup>Syarifuddin Jurdi, *op. cit.*, hlm. 468.

dengan Pancasila. Intinya, bahwa praktik keislaman yang mengambil jalan garis keras perlu untuk didiskusikan kembali tentang kebenarannya. Yang penting ditegaskan adalah, bahwa terkait dengan hal ini penafsiran Islam para ulama Indonesia pada dasarnya telah selesai dan mereka sepakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy In Islam*, (Oxford University Press, 2000).
- Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009).
- Azyumardi Azra, Islam dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia, Turki, dan Negara-Negara Arab, Makalah ini disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Yayasan Paramadina. Jakarta, 17 Juli 2013, <http://paramadina.or.id/2013/11/06/islam-dan-demokrasi/>, diakses 15 September 2015.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Islam Tentang Teokrasi, Demokrasi, dan Nomokrasi", 70 TAHUN PROF. DR. TAHIR AZHARY, SH., <http://www.jimly.com/makalah/namafile/152/>, diakses 15 September 2015.
- Syafi'i Anwar, M., "Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia", *Pengantar dalam M Zaki Mubarak, Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008).
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Zaki Mubarak, M., *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008).